

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu suatu bentuk kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut dapat dikatakan kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan rakyat, rakyat memiliki hak, kewajiban, kesempatan, bebas berbicara, bebas mengungkapkan pendapat serta bebas berekspresi dan bebas berkarya tanpa harus di batasi ataupun dihalangi dan berhak mengemukakan pendapat dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berlaku dalam Negara.¹

Salah satu kekuatan sosial politik yang menjadi gerakan dakwah yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS berdiri sejak tahun 1999 yang mulai memunculkan eksistensinya sebagai kekuatan politik baru dengan nama Partai Keadilan, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dimana sebelumnya dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi tanpa bentuk. Tidak lama setelah rezim orde baru tumbang. Sepanjang perkembangan Partai Keadilan (PK) dan PKS, kader-kader partai berusaha menempatkan dakwah dan politik sebagai elemen yang tidak terpisahkan

Mayoritas penduduk kecamatan lima puluh menganut agama islam yakni 92.42% umumnya adalah orang Melayu, Jawa, Minangkabau, dan sebagian Suku Batak. Kemudian dari hasil perolehan suara atau dukungan masyarakat muslim terhadap Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan kepala daerah tahun 2019 di Kecamatan Lima Puluh rendah yakni sekitar 32%

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik di indonesia yang berbasis islam. Partai ini didirikan pada 1998 dengan nama awalnya partai keadilan (PK). PKS memulai debutnya di pemilu 1999 dengan meraih 1,43 juta suara atau 1,36% dari total suara sah nasional. Kemudian dalam pemilu 2004 PKS mampu mendulang 8,33 juta suara (7,34%), dalam pemilu 2009 meraih 8,23 juta suara (7,89%), dan dalam pemilu 2014 memperoleh 8,46 juta

¹Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 189.

suara (6,77%). Pencapaian tertinggi PKS diraih dalam pemilu 2019, dengan perolehan sebanyak 11,49 juta suara (8,21%). Jumlah tersebut melonjak sebanyak 3,04 juta suara atau naik sekitar 36% dari perolehan di pemilu sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, PKS mampu menempatkan 50 orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah tersebut persinya mencapai 8,7% dari total kursi DPR periode 2019-2024.

PKS lahir melalui gerakan sosial bernama Tarbiyah yang kemudian bermutasi menjadi partai politik. Basis sosial partai tersebut ialah kelompok muslim terdidik, muda dan kelas menengah kota. Tidak seperti partai politik lain, PKS selalu mampu mendulang simpati publik dengan memobilisasi kader dan simpatisannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial secara terus-menerus dan tidak hanya menjelang pemilu. PKS tampil berbeda melalui sistem kaderisasi yang terorganisir dan sistematis serta meniscayakan komitmen dan keterlibatan aktif para kadernya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin diselenggarakan seperti halaqah menjadi aspek-aspek penting dalam kehidupan partai dan anggota-anggotanya. Halaqah secara sederhana dalam istilah kader-kader PKS yaitu kelompok pengajian kaderisasi untuk para kader maupun pendukung² yang biasanya beranggotakan 8-12 orang yang dikelola oleh seorang *murabbi* (guru) dan anggota pengajian dikenal dengan istilah *mutarabbi*. Sedangkan liqodalam bahasa arab artinya pertemuan, yang esensinya sama dengan halaqah yakni istilah yang digunakan untuk menyebut secara umum pertemuan kelompok pengajian kaderisasi PKS.

Kader yang mengabaikan loyalitas dan komitmen total terhadap nilai-nilai dakwah akan sulit berkembang di dalam partai. Kehidupan di internal PKS amat kaya dan intensif. Seluruh aspek-aspek internal ini adalah manifestasi dari sebuah partai yang juga memerankan diri sebagai gerakan sosial-keagamaan. Sebagaimana gerakan-gerakan Islamis lainnya, PKS lahir dari diskusi-diskusi kecil dikalangan mahasiswa beberapa universitas yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik. PKS muncul

² Anto Rohman (42 tahun), Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara *Observasi dan Wawancara*, 4 november 2022

sebagai gerakan sosial Islam yang masih tetap mempertahankan karakter dasarnya dengan menambah kapasitas organisasi dan sumber dayanya. Yang mana dimulai dengan fase dakwah kampus, pembentukan gerakan mahasiswa dan gerakan politik. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai yang menjadikan politik sebagai sarana (wasilah) dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kenegaraan.³

Dalam proses memajukan kehidupan pemerintahan dan kehidupan politik negara yang juga berperan adalah seluruh masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia. Karena demokrasi memberi peran yang besar bagi partai politik untuk menjadi penyelenggara negara, maka partai politik harus didukung keberadaannya, karena melalui orang-orang yang ada didalam partai politik (politikus), inilah kemajuan dan kesejahteraan bangsa dipertaruhkan.⁴

Pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan wakil presiden, sesuai dengan sistem pemerintahan demokrasi, pemimpin tersebut harus di pilih secara langsung melalui pemilihan umum yaitu, proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu secara demokratis oleh rakyat Indonesia baru dapat terlaksana pada tahun 1999 namun, pelaksanaan yang di cita-citakan sesuai pilihan hati secara bebas dan langsung oleh masyarakat. Pemilihan umum juga merambah ke Provinsi dan Kota atau Kabupaten, pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) atau sering disebut PILKADA.⁵

Pada akhir-akhir ini terjadi krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perilaku para elit politik yang buruk dimata masyarakat. Masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu karena mereka berkaca dari pemilihan-pemilihan pemimpin ditahun sebelumnya. Jalannya pemilu dari tahun ketahun semakin berubah, semakin majunya suatu zaman maka semakin modern pula perkembangan dan pemikiran masyarakat. Persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi politik seiring maraknya Internet dan media sosial.

³Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), h. 123.

⁴Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik*, *jurnal kewarnegaraan pendidikan*, vol.1 no.9, 2015 h. 2

⁵Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, ,, h. 162

Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi. Suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan saat kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Partisipasinya masih kurang dan bahkan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.⁶

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan Kepala Daerah yang memiliki visi meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Maka pada hakikatnya pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

⁶Sarbaini, Harpani Matnuh, Zainal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik*, ... h. 2

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁷

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harapan besar mengenai implikasi pilkada langsung ini, rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang-undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk tingkat provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu faktor pendukung Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu.⁸

Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang

⁷Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2010) , h. 183.

⁸Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* , ...h. 184

kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.⁹

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencoba menghidupkan kembali prinsip kejamaah di antara para aktivisnya sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya. Mereka berupaya saling mengenal, memahami, menolong dan hidup sepenanggungan dalam berbagai keadaan yang menyertainya. Eksperimen membangun komunitas jamaah dalam suatu partai politik itu diwujudkan adalah adanya struktur. Dewan Syariah dalam organisasi partai yang mengontrol seluruh sepak terjang partai. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang dengan mayoritas warganya beragama Islam. Terutama di daerah Kecamatan lima puluh yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebagiannya lagi ada juga masyarakat yang beragama non muslim, tentu dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam tersebut akan berpengaruh atau mendorong masa pemilih atau perolehan suara partai. Dengan demikian, dalam pemilu dapat diasumsikan bahwa partai yang berasaskan Islam akan mendapat perolehan suara yang lebih unggul atau bahkan menang dibanding dengan partai yang berasas sekuler atau nasionalis. Hal ini terjadi pada pola pemilih partai Islam, pemilih partai Islam cenderung lebih menerima suatu partai yang menerima kemajemukan atau keberagaman tersebut ketimbang partai yang berdasarkan asas atau ideologi tertentu seperti Islam atau yang mengatasnamakan agama tertentu.¹⁰

Dalam kajian politik islam memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah). Dari hadist itu dapat dipahami, jika dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi yang

⁹ Irawan, *Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik*, 2010, h. 2.

¹⁰ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Konsentrasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 222

berada dalam satu komunitas besar, misalnya kabupaten/kota, maka wajib memilih atau mengangkat pemimpin. Akan tetapi, kewajiban memilih pemimpin hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam SURAT An-Nisa ayat 59, Allah SWT menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin (ulil amri)



Namun ada hal penting yang harus diingat, dalam memilih pemimpin hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela, seperti politik uang. Dalam ajaran islam, politik uang (riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadist yaitu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dari penjelasan hadist diatas dapat diartikan, yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan kepala daerah 2019 di Kecamatan Lima Puluh ?
2. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan kepala daerah 2019 di Kecamatan Lima Puluh ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini penulis akan mencantumkan beberapa batasan sebagai berikut :

1. Pandangan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengamatan.
2. Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya
3. Partai Politik sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material
4. Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri,

D. Tujuan penelitian

Tujuan agar mengetahui pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan kepala daerah 2019 di Kecamatan Lima Puluh

2. Untuk mengetahui dukungan masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilihan kepala daerah 2019 di Kecamatan Lima Puluh

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti ini data diajukan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Sumatera Utara khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam jurusan Pemikiran Politik Islam Pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang Pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk melihat pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara dapat mengambil manfaat dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya peningkatan nilai nilai dalam pandangan masyarakat terhadap peristiwa politik dalam pemilihan kepala daerah. Studi ini diharapkan memiliki kekuatan pada masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang peran partai politik.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Jurnal yang disusun oleh Anna Dameria Turnip, Irawan Suntoro, Yunisca Nurmalisa dengan judul "*Presepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Kepala Daerah*". Jurnal terdahulu ini menjelaskan serta mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat Lampung Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015. Pada kajian terdahulu ini dengan peneliti terdapat kesamaan yaitu mengkaji tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan perbedaanya pada kajian terdahulu hanya berfokus kepada "*Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah*". Kalau peneliti berfokus kepada pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara.
2. Skripsi yang disusun melalui oleh Wahyu Rahma Dani Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

berjudul *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”*. Ia menjelaskan bahwa bentuk partisipasi politik warga dalam pemilu pada 2009 di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berubah menjadi terbagi menjadi voting, kampanye, dan berbicara tentang isu-isu politik. Pada skripsi terdahulu ini dengan peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu mengkaji tentang pemilihan dalam pelaksanaan pemilu, sedangkan perbedaannya pada kajian terdahulu hanya berfokus kepada partisipasi politik pada pemilihan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Kalau peneliti berfokus kepada pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara.

3. Skripsi yang disusun Oleh Ahmad Sahid Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman berjudul *“Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser)”* ia mendefinisikan perbedaan dalam derajat partisipasi politik antara Desa Tanjung Aru dan Desa Selengot yang menunjukkan evaluasi partisipasi politik dalam kampanye pemasaran aktivitas dan hak pilih mereka. Pada skripsi terdahulu ini dengan peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu mengkaji tentang masyarakat dalam pemilihan kepala Daerah, sedangkan perbedaannya pada kajian terdahulu hanya berfokus kepada Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser). Sedangkan peneliti berfokus kepada pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara.
4. Skripsi yang disusun Adhitya Oktayudiarta Saswoyo Putra Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro berjudul *“Perbandingan Tingkat Partisipasi*

Pemilih Di Kabupaten Grobogan Dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 Dan Pemilukada Jawa Tengah 2013". Ia mendefinisikan perbedaan dalam derajat partisipasi dalam Pilkada Kabupaten Grobogan 2011 dan Pilkada Jawa Tengah 2013, selain untuk melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan 2011 dan Pilkada Jawa Tengah 2013 di Kabupaten Grobogan. Pada skripsi terdahulu ini dengan peneliti terdapat kesamaan yaitu mengkaji tentang Pilkada, sedangkan perbedaannya pada kajian terdahulu hanya berfokus kepada Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kabupaten Grobogan Dalam Pemilukada Kabupaten Grobogan 2011 Dan Pemilukada Jawa Tengah 2013. Sedangkan peneliti berfokus kepada pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Batu Bara.

5. Skripsi yang disusun Herlia Amir Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul *Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Sulawesi Tenggara Serta Solusinya*" ia mendefinisikan tentang faktor pendukung dan penghambat strategi dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sulawesi Tenggara serta solusinya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di Kota Kendari Sulawesi Tenggara yaitu strategi dakwah PKS di kota Kendari, Kab.Muna dan Anggota legislatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dakwah, komunikasi dan pendekatan sosiologis. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus inti Partai Keadilan Sejahtera di Kota Kendari yakni ketua umum dan sekretaris umum, dan ketua bidang dakwah DPW Sulawesi Tenggara, sekretaris DPD PKS Kab.Muna dan anggota legislatif, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta dokumentasi mengenai pelatihan yang pernah diikuti oleh para kader. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen masing-masing sesuai metodenya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah upaya mencoba dan menemukan, mengembangkan, dan memeriksa realitas pengetahuan, upaya yang dicapai menggunakan pendekatan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti deskriptif kualitatif yakni ialah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan tujuan dan meringkas berbagai macam kondisi, berbagai variable yang timbul dan berbagai situasi yang terdapat dimasyarakat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu, dan menilai hal - hal yang berhubungan dengan sehari - hari.

Dari penjelasan diatas penelitian kualitatif dalam penulisan laporan ini ialah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang akurat, mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Batu Bara.

2. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan orang orang yang dapat dijadikan sebagai pusat pemberian informasi dalam penelitian ini, dan yang menjadi informan penelitian dalam penelitian Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Lima Puluh adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN
1.	Rodial	Ketua PKS Kabupaten Batu Bara
2.	Erwin. S.Sos	Komisioner Divisi Teknis KPU Kabupaten Batu Bara
3.	Ponimin S.Sos	Kepala Desa Kecamatan Lima Puluh

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan berbagai pertimbangan. Lokasi penelitian merupakan tempat yang dilakukan sebagai penelitian mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Batu Bara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari berbagai teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi antara peneliti dengan yang di teliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam mewawancara yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan pengumpul data dengan informan sehingga informan memberikan data yang di perlukan oleh peneliti. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Batu Bara.

b. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati program yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri oleh orang lain tentang subjek. Cara yang dapat dilakukan peneliti ialah dengan membaca dari berbagai macam riteratur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti melalui buku, diktat, dan lain-lain. Dokumentasi yang diambil peneliti merupakan

dokumentasi mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Batu Bara.

5. Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah salah satu proses penelitian yang dikerjakan apabila semua data yang dibutuhkan dalam memecahkan sesuatu permasalahan yang hendak diteliti telah lengkap keseluruhannya. Kegiatan analisis data ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan semena-mena dikarenakan keakuratan dan ketajaman dalam menggunakan alat analisis data ini sangat sekali menentukan keakuratan dalam pengambilan suatu kesimpulan.

Analisis data ini digunakan dalam suatu kesimpulan. Sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

a. Penyajian Data

Penyajian data ke dalam substansi konseptual yang tepat dan cepat yang menempatkan peluang penarikan kesimpulan dari temuan-temuan studi. Penyajian data diselesaikan dalam bentuk deskripsi. Sehingga peneliti dapat mengenali apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada hakikatnya, langkah menuju tingkat penyampaian informasi studi juga dalam bentuk bagian dan kumpulan yang tidak terpisahkan sesuai dengan prosedur analisis studi.

b. Penarikan Kesimpulan

Setelah informasi kajian disajikan dalam bentuk deskripsi, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan di tingkat awal bebas tetapi terbuka untuk kritik. Prosedur verifikasi dalam contoh ini bertujuan untuk menampilkan garis besar semua informasi yang diperoleh dalam tampilan, jadi ujung terakhir harus ditarik. Jika masih diperlukan, informasi dan data tambahan dicari lagi.

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menegaskan keabsahan informasi yang diperoleh bahkan di dalam lapangan, banyak strategi telah ditetapkan termasuk: perluasan partisipasi, ketekunan studi, pemeriksaan komunitas terdekat, aset dan teori terkini, terutama: dengan bantuan menggunakan pemeriksaan silang dan analisis semua data dan informasi untuk diakumulasikan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan proposal ini, dibagi dalam lima bab yang didalamnya berisi tentang beberapa penjelasan yang berguna dalam kerangka bahasan berikut :

BAB I : Memaparkan berupa pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, pendekatan penelitian, subjek penelitian, informan penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II: Landasan teori yang meliputi: pengertian pandangan, masyarakat, partai politik, pemilihan kepala daerah.

BAB III : Membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian yang didalamnya terdiri dari: letak geografis kecamatan lima puluh, keadaan demografis kecamatan lima puluh, pemilihan kepala daerah di kecamatan lima puluh, komisi pemilihan umum di kecamatan lima puluh.

BAB IV: Hasil penelitian menyajikan pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah di batubara.

BAB V : Terakhir berupa bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran